

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan Tjitrosoedibio

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Penjelasan Pasal 2 ayat 1a Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penjelasan Pasal 2 ayat 1b Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan NPWP dalam Pelayanan Publik

PMK 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK No 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

### BUKU

M Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2021).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2014).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005).

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003).

Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. (Sidoarjo: Citra Media. 2003).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2003).

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. (Jakarta. PT Raja Grafindo. 2007).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit UI Press. 2015).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005).

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras. 2011).

## **JURNAL**

Adiyanta, FC Susila. “Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak dalam Sistem Self Assessment”. *Jurnal Administrative Law & Governance*. Vol 5 No 1. (2022).

Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”. *Jurnal USM Law Review*. Vol 5 No 1. (2022).

Amsori, Fakhri Awaluddin, dan Momon Mulyana. “Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital”. *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*. Vol 02. No 01. (2024).

Anugrah, M Sahib Saesar, dan Primandita Fitriandi. “Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*”. *Jurnal Info Artha*. Vol 6 No 1. (2022).

Aprilia, Nurul. “Pengaruh Efektivitas Kebijakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Samsat Lubuk Pakam”. *Skripsi*. Universitas Medan Area Medan. (2023).

Ariffin, Melissa dan Tunjung Herning Sitabuana. “Sistem Perpajakan Di Indonesia”. *Jurnal Serina IV Untar*. (2022).

Ayuningtyas, Amalia dan Imahda Khoiri Furqon. “Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak”. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Vol 3 No 3. (2023).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (BAPPEDA). “Buku Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024”.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 7 No 1. (2020).

Christine, Bella. dan Christene S.T. Kansil. “Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”. *Jurnal Syntax Literate*. Vol 7. No 09. (2022).

Dahlan, Muhammad. “*Shadow Economy*, AEOI, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Scientax*. Vol 2 No 1. (2020).

Fransiska. Dkk. “Analisis Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. XXX Tahun 2018”. *Jurnal Multiparadigma Akutansi*. Vol III No 2. (2021).

Gloria, Estevania Angel dan Indrawati Yuhertiana. “Pengaruh Peadanan NIK Menjadi NPWP Terhadap Pengkinian Data Pelanggan Di PT. Borwita Citra Prima”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*. Vol 2 No 8. (2024).

Kelompok Keahlian Business Finance and Sustainability, Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Compliance Cost dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Laporan Akhir Riset Bersaing, Universitas Internasional Semen Indonesia. (2023).

Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling”. *Jurnal Historis*. Vol 6. No 1. (2021).

Matondang, Khairani Alawaiyah. Dkk. “Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dampaknya Bagi Publik”. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Bisnis Syariah*. Vol 6 No 6. (2024).

Maulidia, Anisa. dkk, “Analisis Efektivitas Pada Integrasi NIK Menjadi NPWP Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak dalam Konteks Akuntansi Perpajakan

(Studi Kasus KPP Pratama Jember). *Jurnal Of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)*. Vol 1 No 2. (2023).

Melani, Rr. Adeline dan Eddie I. Doloksaribu. “Tinjauan Yuridis Integrasi NIK Menjadi NPWP”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. Vol 9 No 1. (2024).

Nurjanah, Ayu. “perlindungan hukum terhadap anak jalanan di tinjau dari peraturan daerah kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Prespektif Fiqh Siyasa Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan satpol PP Kota Mojokerto)”. Skripsi. Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. (2019).

Putra, Fahmi Lesmana Hadi. dkk, “Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak”. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*. Vol 7 No 1. (2022).

Rezky, Nanda Puja. “Kajian Kegiatan *Shadow Economy* Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur”. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Vol 6 No 2. (2020).

Saputra, Acwin Hendra dan Rahadi Nugroho, “Faktor-Faktor yang menentukan Besaran Shadwo Economy Pada Brics Countries Dan Indonesia”. *Jurnal PKN STAN*. Vol 1. (2016).

Sijabat, Fitry Megasari dan Gunawan Widjaja. “Cybersecurity Dan Perlindungan Data Dalam Sistem Perpajakan Digital”. *Jurnal Sibatik.*, Vol 4 No 4. (2025).

Suastika, I Nengah. “Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perspektif Hukum Pajak”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 7 No 1 (2021).

Syahrizal, Hasan dan M. Syahran Jailani. “Jenis-jenis Penelitian Dalam Kuantitatif dan Kualitatif”. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*. Vol 1 No 1. (2023).

Tobing, Even Gio Lumban dan Kusmono. “Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP”. *Jurnal Pajak Indonesia*. Vol 6 No 2. (2022).

Widnyaningdias, Ketut Eka. “Persepsi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak”. Skripsi. Politeknik Negeri Bali. (2022).

Yahya, Abinsa Assagaf. “Analisis Efektivitas NPWP Instansi Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Di KPP Pratama Tegal”. Karya Tulis Tugas Akhir. Politeknik Keuangan Negara STAN. (2020).

## SITUS

Hariani, Aprilia. “DJP: 99,17 Persen Wajib Pajak Sudah Padankan NIK – NPWP hingga 11 Oktober 2024”. *Pajak.com*, diakses pada tanggal 4 juli 2025. <https://www.pajak.com/pajak/djp-9917-persen-wajib-pajak-sudah-padankan-nik-npwp-hingga-11-oktober-2024/>

*CNBC Indonesia*, “Hati-hati! Ekonomi Bawah Tanah RI Bisa Tembus Rp 5.091 T”, terbit pada tanggal 29 Desember 2022 yang diakses pada tanggal 13 November 2024 pukul 19.46 WIB. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221229093833-17-401078/hati-hati-ekonomi-bawah-tanah-ri-bisa-tembus-rp-5091-t>

Dandy Naufalzach Fadlurahman. “DJP Peduli dengan Data anda”. diterbitkan pada tanggal 22 April 2024 diakses pada tanggal 18 Mei 2025. <https://pajak.go.id/id/artikel/djp-peduli-dengan-data-anda>

Direktorat Jenderal Pajak, “Penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA) pada Aplikasi DJP Online”, *Artikel DJP*, <https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/112692?utm>

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, “Tata Cara Pengaduan”, *Artikel DJP*, <https://www.pajak.go.id/id/tata-cara-pengaduan>.

*Kompas.com*. “Tak Setor PPN Rp 1,16 Miliar, Juragan Kopi Jadi Tersangka Kasus Perpajakan”. terbit pada tanggal 12 Januar 2024 yang diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 Pukul 20.15 WIB, <https://regional.kompas.com/read/2024/01/12/160144078/tak-setor-ppn-rp-116-miliar-juragan-kopi-jadi-tersangka-kasus-perpajakan>.

Laporan Kinerja KPP Pratama Bantul Tahun 2024, LAKIN KPP Pratama Bantul, <https://pajak.go.id/sites/default/files/202503/LAKIN%202024%20KPP%20Pratama%20Bantul.pdf>

Mukhamad Wisnu Nagoro. “Dibawah Bayang-bayang Shadow Economy”. terbit pada 29 Mei 2023 yang diakses pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 13.43 WIB. <https://pajak.go.id/id/artikel/di-bawah-bayang-bayang-shadow-economy>

PPATK. “Shadow Economy sebabkan Ekonomi Indonesia Terdistorsi”. terbit pada tanggal 17 Maret 2022 yang diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 19.52 WIB. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1178/shadow-economy-sebabkan-ekonomi-indonesia-terdistorsi.html>.

Rejogja. “Penggelapan Pajak Distributor Migor, Kejati DIY Kejar Pidana Denda Rp 180 M”. terbit pada 25 April 2024 yang diakses pada tanggal 5 Oktober 2024. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sch5qj432/penggelapan-pajak-distributor-migor-kejati-diy-kejar-pidana-denda-rp-180-m>.

Risandy Meda Nurjanah. “DJP Ungkap Modus Baru Penipuan, Wajib Pajak Diminta Lebih Waspada”. *Artikel Konsultanpajaksurabaya.com*. diterbitkan pada 23 September 2024, diakses pada 18 Mei 2025. <https://konsultanpajaksurabaya.com/djp-ungkap-modus-baru-penipuan-wajib-pajak-diminta-lebih-waspada?utm>

Rita Puspita Sari. “Waspada! Penipuan Coretax Pajak Marak, Ini Modusnya!”. *Artikel Computer Security Incident Response Team*. diterbitkan pada 01 Maret 2025. diakses pada 18 Mei 2025. <https://csirt.or.id/berita/waspada-penipuan-coretax-pajak?utm>.

Rizka Sulistiyani, “Seputar Pemadanan dan Pemutakhiran NIK-NPWP”, *Website DJP*, diakses pada tanggal 4 Juli 2025, <https://pajak.go.id/id/artikel/seputar-pemadanan-dan-pemutakhiran-nik-npwp>

Sedata Sebantul, “Jumlah wajib pajak terdaftar “, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, diakses pada tanggal 16 November 2024, [https://data.bantulkab.go.id/search/detail?data\\_id=9.17.0002&year=2022%20-%202024](https://data.bantulkab.go.id/search/detail?data_id=9.17.0002&year=2022%20-%202024).

Siaran Pers Kanwil Ditjen Pajak DIY, “Pajak DIY Optimis Capai Target Kepatuhan SPT”, diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2024 diakses pada tanggal 16 November 2024, <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/bulan-juni-2024-pajak-diy-optimis-capai-target-kepatuhan-spt>

Siaran Pers Kanwil Ditjen Pajak DIY. “Penerimaan Pajak DIY Capai 93,2%: Optimis Lampau Target”. diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2023 diakses pada tanggal 22 Januari 2025. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/penerimaan-pajak-diy-capai-932-optimis-lampau-target>.

Teddy Ferdian. “Implementasi NIK sebagai NPWP, Perhatikan 4 Hal Ini”. *Website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. terbit pada 26 Juli 2022 yang diakses pada tanggal 10 Mei 2025. <https://pajak.go.id/id/artikel/tahun-2024-nik-resmi-gantikan-npwp-ayo-segera-padankan-data>.

Ulil Amri Nurdin. “Tahun 2024 NIK Resmi Gantikan NPWP, Ayo Segera Padankan Data”. *Website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. terbit pada 05 Oktober 2025 yang diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

<https://pajak.go.id/id/artikel/tahun-2024-nik-resmi-gantikan-npwp-ayo-segera-padankan-data>.

*Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “Potensi Investasi”, diakses pada tanggal 16 November 2024, [https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/potensi\\_investasi/detail/24-sektor-perindustrian-dan-ekonomi-kreatif](https://dpmppt.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/24-sektor-perindustrian-dan-ekonomi-kreatif).*

Website Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. “Praimplementasi Coretax DJP. Wajib Pajak Dapat Log In Mulai 24 Desember 2024”. terbit pada 24 Desember 2024 yang diakses pada tanggal 10 Mei 2025. <https://pajak.go.id/id/artikel/praimplementasi-coretax-djp-wajib-pajak-dapat-log-mulai-24-desember-2024>

## **WAWANCARA, KUISIONER DAN DATA PENELITIAN**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, Data SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi Tahun 2022 - 2024, diperoleh langsung dari KPP Pratama Bantul, April 2025.

Kuisisioner tentang Efektivitas Penerapan Integrasi NPWP Dengan NIK Sebagai Instrumen Pajak Dalam Upaya Mengurangi Shadow Economy yang disebarakan secara daring melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

*Wawancara* dengan Desi Fiki selaku Staf Bagian Usaha Mikro di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. pada tanggal 22 April 2025 Pukul 11.39 WIB.

Wawancara dengan Huda Hermawan selaku *Account Representative (AR)* di KPP Pratama Bantul, 28 April 2025 Pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Ikhwan Catur R selaku Asisten Penyuluh Pajak di KPP Pratama Bantul. 28 April 2025 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Tatang Bastian Ketua Komunitas Kopi Bantul, 11 April 2025 Pukul 19.00 WIB.